

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang akan mendasari penelitian ini. Pembahasan ini akan menjadi panduan dalam memahami secara mendalam secara mendalam untuk memecahkan permasalahan yang ada serta akan dibahas mengenai studi terkait dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1 Landasan Teori

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Realisasi Investasi Asing.

2.1.1 Kemiskinan

Menurut Nurwati (2008), kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada dalam kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan telah ada sejak zaman manusia itu sendiri, dan unsur-unsur pokok permasalahan tersebut berkaitan dengan berbagai bentuk dan karakteristik kehidupan manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan merupakan masalah kehidupan global berarti bahwa masalah kemiskinan telah menjadi masalah global, dan meskipun dampak kemiskinan sangat berbeda, masalah ini ada di semua negara.

Menurut BPS (2016), kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi dari segi ekonomi, materi dan fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dengan pengeluaran. Skala kemiskinan menggunakan garis kemiskinan. Terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah biaya

pengeluaran yang berasal dari kebutuhan minimum makanan yang dihitung sebesar 2.100 kalori per hari per orang, dan garis kemiskinan bukan makanan dihitung dari kebutuhan minimum sandang, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya.

Data yang digunakan adalah persentase penduduk miskin yang merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

2.1.1.1 Jenis-jenis Kemiskinan dan Ciri-ciri Penduduk Miskin

Kemiskinan menurut Arsyad (2010), kemiskinan dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang di ukur dari pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum atau kebutuhan dasar kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan untuk mencukupi hidupnya.

- b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar.

Kemiskinan menurut Suryawati (2005), dapat di lihat dari ciri-ciri kelompok penduduk sebagai berikut :

- a. Mempunyai pendidikan yang rendah.
- b. Kebanyakan mempunyai usaha sendiri atau bekerja dalam sektor informal, yang sifatnya kecil.
- c. Tidak mempunyai faktor produksi sendiri misalnya tanah, keterampilan dan peralatan untuk bekerja.
- d. Kurangnya memperoleh fasilitas umum.

2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan menurut Suwadi (2014), di sebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Kemiskinan disebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang yaitu:
 - a. Keterbatasan sumber daya modal keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dapat di artikan kualitas sumber daya manusia misalkan keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan.
 - b. Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk dijangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju.

2. Kemiskinan yang disebabkan karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah, dapat di lihat dari berbagai aspek yaitu :
 - a. Pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan atau wilayah yang terpencil dan sulit di jangkau.
 - b. Adanya ketimpangan antara pembangunan di wilayah desa maupun kota.
 - c. Kurang memperhatikan usaha maupun produk masyarakat yang berskala kecil atau usaha mikro ekonomi.

Menurut Arsyad (2010), kemiskinan juga bisa terjadi jika anggota warga tidak atau belum berpartisipasi pada proses perubahan yg ditimbulkan karena ketidakmampuan pada kepemilikan faktor produksi atau kualitas yg kurang memadai.

Menurut Dowling dan Valenzuela (2010), dalam Rini dan Sugiharti (2016), masyarakat juga dapat menjadi miskin karena disebabkan oleh rendahnya modal manusia, seperti pendidikan, pelatihan, atau kemampuan membangun, dan juga memiliki modal fisik yang sangat kecil. Masyarakat yang memiliki modal manusia dan fisik yang baik, akan mungkin tidak memiliki kesempatan bekerja karena adanya diskriminasi.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan *representative*. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP (*United Nation Development*

Programme). Menurut UNDP, Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Menurut BPS (2021), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar. Indeks Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Baeti, 2013).

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran,

pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Harliyani dan Haryadi, 2016).

Ada empat komponen dalam proses mencapai tujuan pembangunan yang harus diperhatikan dalam pembangunan manusia (UNDP, 1995). Empat komponen tersebut dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Produktivitas

Manusia harus berupaya meningkatkan produktivitas serta berpartisipasi secara penuh dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai bagian dari pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi dan sosial politik. Segala hambatan yang dapat mencegah untuk memperoleh akses tersebut harus dihilangkan, karena semua orang harus dapat peluang berpartisipasi dalam mengambil manfaat yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Akses terhadap kesempatan atau peluang yang tersedia harus dipastikan tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang tetapi juga

disiapkan untuk generasi mendatang. Segala sumber daya harus senantiasa dapat diperbarui.

4. Pemberdayaan

Semua orang diharapkan dapat berpartisipasi secara penuh dalam menentukan arah kehidupan mereka. Sama halnya dalam memanfaatkan proses pembangunan maka harus berpartisipasi dalam mengambil keputusan.

2.1.2.1 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

- a) Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b) Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- c) Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- d) Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu:

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).

2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$IPM = (\sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}) 100$$

dimana:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Kesehatan = Indeks Kesehatan

Pendidikan = Indeks Pendidikan

Pengeluaran = Indeks Pengeluaran

Secara detail, prosedur perhitungan IPM ialah sebagai berikut:

2.1.3 Tingkat Pengangguran

Menurut BPS (2021), dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan

(Mankiw, 2000).

Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan

- a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*) Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

- b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)
 1. Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
 2. Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

2.1.3.1 Teori Tingkat Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang Teori-Teori Pengangguran di Indonesia yaitu :

- a. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga

(Gilarso, 2004). Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil.

b. Teori Keynes

Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

c. Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Malthus menyuguhkan idenya dalam bentuk yang cukup kaku. Dia mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara “deret ukur” (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara “deret hitung” (misalnya, dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya). Dalam karyanya yang terbit belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, namun tidak sekaku semula, hanya saja dia berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tidak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Dari kedua uraian tersebut Malthus menyimpulkan bahwa kuantitas manusia akan terjerumus ke dalam kemiskinan kelaparan. Dalam jangka panjang tidak ada kemajuan teknologi yang mampu mengalihkan keadaan karena kenaikan supply makanan terbatas sedangkan “pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia”.

Teori Malthus ini menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan

kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia

saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.

d. Teori Sosiologi Ekonomi No-Marxian

Analisis Marx pada awal abad 20 tentang struktur dan proses ekonomi yang dapat dibayangkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif. Industri kapitalis yang ada pada zaman itu tergolong masih kecil dan belum ada satupun yang memegang perekonomian dan mengendalikan pasar. Namun Marx yakin pada suatu saat apabila kapitalisme sudah muncul dengan demikian pesatnya maka akan memunculkan kompetisi antar industri yang menjadi semakin pesat dan kemudian menghasilkan sistem monopoli dari industri yang paling kuat dalam persaingan tersebut. Dengan munculnya monopoli modal ini maka akan ada satu perusahaan besar yang akan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam perekonomian kapitalis. Dalam pengembangan analisis Marx yang dianut oleh para penganut Marxian yang baru ini konsep “kelas buruh “ tidak mendeskripsikan sekelompok orang atau sekelompok pekerjaan tertentu, tetapi lebih merupakan pembelian dan penjualan tenaga kerja. Para tenaga kerja tidak mempunyai alat produksi sama sekali sehingga segolongan orang terpaksa menjual tenaga mereka kepada sebagian kecil orang yang mempunyai alat produksi.

Dari uraian diatas maka dapat kita lihat lagi bahwa dengan adanya pergantian antara sistem kapitalis kompetitif menjadi kearah sistem kapitalis monopoli, maka akan terdapat sebagian perusahaan yang masih tidak mampu bersaing dan menjadi terpuruk. Apabila semua proses produksi dan pemasaran semua terpengaruh oleh sebuah perusahaan raksasa saja, maka akan mengakibatkan

perusahaan kecil menjadi sangat sulit dan hal pemasaran, bisa saja perusahaan kecil tersebut mengalami kebangkrutan dan tidak lagi mampu mengkaji pekerjanya. Setelah perusahaan tersebut tidak mampu beroperasi lagi, maka para pekerja yang semula bekerja dalam perusahaan tersebut menjadi tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kemudian akhirnya pekerja tersebut menjadi pengangguran.

2.1.4 Investasi

Teori ekonomi mendefinisikan investasi merupakan pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa mendatang. Investasi merupakan kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian (Sukirno, 2009).

Beberapa teori dan jenis tentang investasi:

a. Teori Neo Klasik

Teori ini menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Semakin cepatnya perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio capital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya terhadap bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan

teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010).

b. Teori Harrod-Domar

Teori ini mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, ataupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.

c. Jenis Investasi

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Investasi Pemerintah

Investasi ini dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

2. Investasi Swasta

Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi ini bertujuan untuk mencari

keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya penambahan pendapatan.

Dana Investasi swasta awalnya terdiri dari dua macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) merupakan jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Menurut Salvatore (2014) PMA terdiri atas:

1) Investasi portofolio (*portofolio investment*)

Investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.

2) Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*)

Merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam asset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya.

Menurut Harjono (2008) Penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

2.1.4.1 Sifat Proyek Investasi

Menurut Halim (2003) keterbatasan dana yang tersedia untuk membiayai usulan proyek investasi sering kali merupakan penghambat utama dalam proses *capital budgeting*. Dengan demikian, perusahaan perlu mengalokasikannya dalam usulan proyek investasi yang dapat menghasilkan *rate of return* yang paling tinggi dalam jangka panjang. Banyaknya usulan proyek investasi yang akan dibiayai dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu:

1. *Mutually exclusive projects*

Merupakan proyek investasi yang mempunyai fungsi yang sama. Maksudnya jika perusahaan menerima salah satu usulan proyek investasi yang *mutually exclusive*, maka usulan proyek investasi lainnya akan ditolak.

2. Independen Proyek

Merupakan proyek investasi yang mempunyai fungsi yang berbeda. Maksudnya penerimaan usulan proyek investasi yang satu tidak akan menghilangkan kesempatan penerimaan usulan proyek investasi lainnya.

2.1.4.2 Tujuan investasi dan Manfaat Investasi

Tujuan umum dari investasi adalah meningkatkan kesejahteraan investor dalam bentuk finansial. Tandelilin (2010) mengungkapkan tiga alasan mengapa investor melakukan investasi, yaitu:

- a. Mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang
- b. Mengurangi tekanan inflasi
- c. Dorongan menghemat pajak

Dengan beberapa keuntungan yang dapat dihasilkan, seorang investor juga perlu menyadari adanya risiko (*risk*) yang muncul dari aktivitas investasi.

Hubungan *risk* dan *return* yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linier. Artinya, semakin besar *return* yang diharapkan maka semakin besar *risk* yang ditanggung (Fabozzi, 2000). Konsep dasar mengenai *return* dan *risk* dijelaskan sebagai berikut :

a. Keuntungan (*return*)

Return dari suatu aset adalah pengembalian atau hasil yang diperoleh akibat melakukan investasi, *Return* merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi karena dapat menggambarkan secara nyata perubahan harga. Dalam konteks manajemen investasi, perlu dibedakan antara *return* yang diharapkan (*expected return*) dengan *return* aktual (*realized return*). *Return* yang diharapkan merupakan tingkat *return* yang diprediksi oleh investor akan terjadi di masa mendatang. *Return* aktual adalah tingkat *return* yang benar-benar terjadi.

b. Resiko (*risk*)

Secara umum, resiko adalah tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu atau tidak terwujudnya sesuatu oada suatu kurun waktu atau periode tertentu (*time period*). Dalam bidang finansial, resiko sering dihubungkan dengan volatilitas atau penyimpangan (deviasi) antara *return* yang diharapkan (*expected return*) dengan *return* aktual (*realized return*). Volatilitas merupakan besarnya harga fluktuasi dari sebuah aset. Semakin besar volatilitas aset, makan semakin besar kemungkinan mengalami keuntungan atau kerugian.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2008), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi yang perlu dicapai perlu dihitung adalah pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu harga berlaku ditahun dasar yang dipilih. Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian suatu negara.

Menurut Arsyad (2010), pertumbuhan ekonomi adalah suatu peningkatan pada output (barang dan jasa) masyarakat dengan semakin bertambah banyaknya jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan pada proses produksi, dengan tanpa adanya perubahan pada teknologi yang digunakan produksi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi pusat perhatian dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berjuang dalam meningkatkan pertumbuhannya. Secara umum pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai sebuah peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan perekonomian dalam produksi barang dan jasa.

Menurut Sukirno (2011), pertumbuhan ekonomi adalah sebagai sebuah perkembangan dalam kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan output (barang dan jasa) pada kegiatan produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran pada masyarakat meningkat. Berdasarkan pada pertumbuhan

ekonomi diberbagai negara dapat diartikan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara adalah ketersediaan sumber daya alam dan tanahnya, mutu dan jumlah tenaga kerja, tingkat teknologi yang digunakan, barang modal yang tersedia serta sistem sosial dan sikap masyarakat.

Rumus :

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$PDRB_t$ = Produk Domestik Bruto Tahun Tertentu
 $PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Bruto Tahun Sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitanya dengan meningkatnya barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat, maka semakin banyaknya barang dan jasa yang diproduksi berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusianya. Dengan modal manusia yang berkualitas maka kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik.

2.1.5.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi pemerintah menurut para ahli ekonom yaitu: (Arsyad, 2010):

a. Teori Neoklasik (Sollow Swan)

Menurut Arsyad (2010), ekonom yang menjadi perintis dalam pengembangan teori Neo Klasik adalah Robert Sollow dan Trevor Swan yang dimulai pada tahun 1950-an. Pada teori ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi

(penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini perkembangan ekonomi pada dasarnya ditentukan pada faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan kumulasi modal) kemudian tingkat kemajuan teknologi.

a) Teori Harrod-Donar

Menurut Arsyad (2010), pada teori pertumbuhan ekonomi Harrod- Donar merupakan teori perluasan dan analisis dari dua orang ekonom sesudah Keynes yaitu Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar. Harrod mengemukakan teorinya dalam *Economic Journal* dengan judul *An Essay on Dynamic Theory*. Domar mengemukakan teori pertamanya pada *American Economic Review* dengan judul *Expansion and Employment* pada tahun 1947. Kegiatan ekonomi yang secara nasional dan masalah pada tenaga kerja.

b) Teori Schumpeter

Menurut Arsyad (2010), pada teori Schumpeter yang dikemukakan pada tahun 1934 dan pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Schumpeter menggambarkan teori ini tentang bagaimana proses pembangunan dan faktor utama dalam menentukan pembangunan dalam bukunya yang berjudul *Business Cycle*. Menurut Schumpeter, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu proses inovasi yang dilakukan inovator atau wiraswasta.

2.1.6 Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Shaleh, *et al* (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB terhadap

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan, Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan, dan Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan sumber lain yang terkait. Data di analisis dengan Model Regresi Linear Berganda dengan menggunakan Aplikasi SPSS 26. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Secara Parsial Pengangguran Berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, Secara Parsial Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, Secara Simultan Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berpengaruh Signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa untuk menurunkan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur secara signifikan maka ketiga Variabel Independen tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mengambil kebijakan-kebijakan pembangunan.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Ridho, *et al* (2018) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan pada 35

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan data *cross-section* terdiri dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan data *time-series* yaitu tahun 2011-2015. Alat analisis yang digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel yaitu *Fixed Effect Model (FEM)* atau disebut juga *Least Square Dummy Variable*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Berdasar hasil penelitian maka pemerintah disarankan untuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dan pengoptimalan pelayanan kesehatan.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Lily dan Rini (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Studi ini bertujuan memverifikasi apakah produk domestik regional bruto, tingkat pengangguran, dan IPM memberikan kontribusi pada kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia selama periode 2011-2017. Penelitian ini bersifat asosiatif karena bertujuan untuk menguji pengaruh antar variable penelitian. Data penelitian diambil dari situs online Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Metode regresi dengan data panel dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-views. Hasil uji chow dan hausman menyimpulkan model efek tetaplah yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan laju PDRB, IPM, dan pengangguran secara simultan memberikan pengaruh pada kemiskinan. Pengujian

secara parsial menunjukkan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh laju PDRB dan pengangguran . Sedangkan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Pemerintah diharapkan fokus dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan pendapatan daerah meningkat, maka diharapkan pengangguran berkurang dan tingkat kemiskinan juga berkurang. IPM juga tentunya memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan daerah karena dengan membangun manusia yang baik diharapkan akan meningkatkan standar hidup masyarakat.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Susanti (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh PDRB, Pengangguran dan IPM terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan Analisa data panel”. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana dan seberapa besar PDRB, IPM dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, sehingga nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebijakan dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier panel data dengan bantuan *STATA 9*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, Pengangguran dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2009-2011.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Radiatul dan Marwan (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh IPM dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2013-2018”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap tingkat

kemiskinan di Sumatera Barat, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat, pengaruh IPM dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif, data yang digunakan adalah data panel dimana penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat pada tahun 2013-2018. Penelitian ini menggunakan Aplikasi Eviews 10, model yang dipilih adalah Random Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

